

**PENGARUH *FINANCIAL TECHNOLOGY*, INTERVENSI PEMERINTAH, STRUKTUR ASET, DAN PEMBIAYAN MURABAHAH TERHADAP**

**SOLUSI PERMODALAN UMKM BIDANG *FOOD AND BEVERAGE***

**DI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**CITRA GITA FIESTRI**

NPM. 4321600131

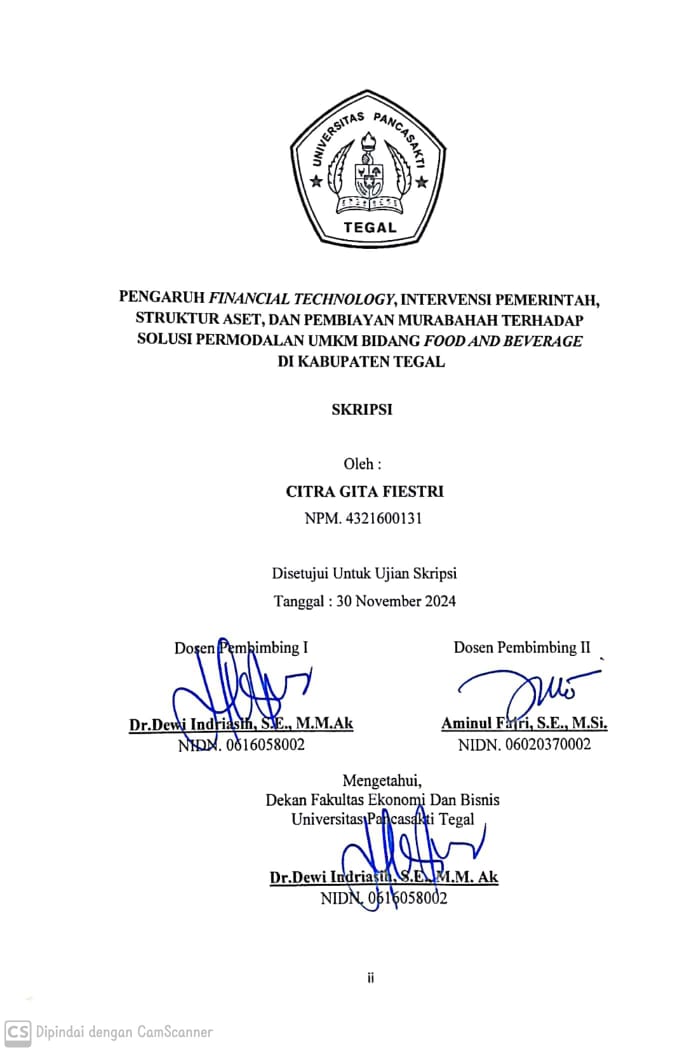
Diajukan Kepada :

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



# 

# 

|  |
| --- |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN **MOTTO**   * “Hidup ini seperti bianglala kadang kita berada di atas dan kadang di bawah, apapun hal yang terjadi dalam hidup ini harus selalu disyukuri dan terus berdo’a kepada Allah SWT agar selalu diberikan kelancaran dalam menjalaninya. Serta berusaha selalu melakukan yang terbaik dimanapu, dan kapanpun situasinya”.   **PERSEMBAHAN**  Saya persembahkan skripsi ini kepada:   1. Kedua orang tua Ibu Ashri Sholicha dan Bapak Rintih Budiarto yang telah dengan sangat sabar dan ikhlas menghidupi, menjaga, merawat, mendidik, dan mengasihiku sejak dalam kandungan hingga aku bisa seperti sekarang ini. 2. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan materil maupun moril 3. Diri saya sendiri dan teman-teman saya Tiara, Halfi, Akbar, Ais, Alfie Vere Likhie yang telah memberikan dukungan moril terus menerus kepada saya. 4. Almamater |

# 

# 

# ABSTRAK

**Citra Gita Fiestri, 2024.** Pengaruh *Financial Technology*, Intervensi Pemerintah, Struktur Aset, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Solusi Permodalan UMKM Bidang *Food and Baverage* di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh *financial technology* terhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, 2) pengaruh intervensi pemerintahterhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, 3) pengaruh struktur asetterhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, dan 4) pengaruh pembiayaan murabahahterhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakaan kuisioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) *financial technology* tidak berpengaruh terhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, 2) intervensi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, 3) struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal, dan 4) pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap solusi permodalan UMKM sektor *Food and Beverages* di Kabupaten Tegal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kata Kunci:** | *Financial Technology,* Intervensi Pemerintah, Pembiayaan Murabahah, Solusi Permodalan UMKM, Struktur Aset |

# ABSTRACT

***Citra Gita Fiestri, 2024.*** *The Influence of Financial Technology, Government Intervention, Asset Structure, and Murabahah Financing on MSME Capital Solutions in the Food and Beverage Sector in Tegal Regency.*

*This study aims to find out 1) the influence of financial technology on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, 2) the influence of government intervention on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, 3) the influence of asset structure on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, and 4) the influence of murabahah financing on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency.*

*The method used in this study is a quantitative method with a data collection method using a questionnaire. The data analysis techniques used consisted of validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis tests.*

*Based on the results of the research conducted, it can be concluded that 1) financial technology has no effect on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, 2) government intervention has a positive and significant effect on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, 3) asset structure has a positive and significant effect on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency, and 4) murabahah financing has a positive and significant effect on the capital solutions of MSMEs in the Food and Beverages sector in Tegal Regency*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Keywords:*** | *Financial Technology, Government Intervention, Murabahah Financing, MSME Capital Solutions, Asset Structure.* |

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pengaruh *Financial Technology*, Intervensi Pemerintah, Struktur Aset, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Solusi Permodalan UMKM Bidang *Food and Baverage* di Kabupaten Tegal”.** Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dewi Indriasih, S.E.,M.M.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E.,M.M.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dewi Indriasih, S.E.,M.M.,Ak selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu membantu dan memotivasi peneliti.
4. Aminul Fajri, S.E.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memotivasi peneliti..

Kami menyadari proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 30 November 2024

Citra Gita Fiestri

# DAFTAR ISI

[PENGESAHAN SKRIPSI iii](#_Toc177760244)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc177760245)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc177760246)

[ABSTRAK vi](#_Toc177760247)

[ABSTRACT vii](#_Toc177760248)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc177760249)

[DAFTAR ISI x](#_Toc177760250)

[DAFTAR TABEL xii](#_Toc177760251)

[DAFTAR GAMBAR xiii](#_Toc177760252)

[DAFTAR LAMPIRAN xiv](#_Toc177760253)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc177760254)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc177760255)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc177760256)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc177760257)

[D. Manfaat Penelitian 7](#_Toc177760258)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc177760259)

[A. Landasan Teori 11](#_Toc177760260)

[1. Financial Technology (Fintech) 11](#_Toc177760261)

[2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 17](#_Toc177760262)

[3. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM 21](#_Toc177760263)

[4. Struktur Aset 24](#_Toc177760264)

[5. Pembiayaan Murabahah 26](#_Toc177760265)

[6. Financial Behavioral Theory 29](#_Toc177760266)

[B. Penelitian Terdahulu 30](#_Toc177760267)

[C. Kerangka Konseptual 36](#_Toc177760268)

[D. Hipotesis 41](#_Toc177760269)

[BAB III METODE PENELITIAN 45](#_Toc177760270)

[A. Jenis Penelitian 45](#_Toc177760271)

[B. Populasi dan Sampel 46](#_Toc177760272)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 49](#_Toc177760273)

[D. Metode Pengumpulan Data 51](#_Toc177760274)

[E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 52](#_Toc177760275)

[F. Metode Analisis Data 52](#_Toc177760276)

[BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 57](#_Toc177760277)

[A. Gambaran Umum Objek Penelitian 57](#_Toc177760278)

[1. Profil Singkat Kabupaten Tegal 57](#_Toc177760279)

[2. UMKM di Kabupaten Tegal 58](#_Toc177760280)

[B. Hasil Penelitian 58](#_Toc177760281)

[1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 58](#_Toc177760282)

[2. Deskripsi Responden 62](#_Toc177760283)

[3. Analisis Statistik Deskriptif 62](#_Toc177760284)

[4. Uji Asumsi Klasik 64](#_Toc177760285)

[5. Analisis Regresi Linear Berganda 68](#_Toc177760286)

[6. Uji Hipotesis 69](#_Toc177760287)

[C. Pembahasan 74](#_Toc177760288)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86](#_Toc177760289)

[A. Kesimpulan 86](#_Toc177760290)

[B. Saran 86](#_Toc177760291)

[DAFTAR PUSTAKA 88](#_Toc177760292)

[LAMPIRAN 93](#_Toc177760293)

# DAFTAR TABEL

Hal

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 33](#_Toc177760626)

[Tabel 3.1 Tabel Pembagian Sampel 48](#_Toc177760786)

[Tabel 3.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 49](#_Toc177760787)

[Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 59](#_Toc177760799)

[Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 61](#_Toc177760800)

[Tabel 4.3 Deskripsi Responden Penelitian 62](#_Toc177760801)

[Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 63](#_Toc177760802)

[Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 65](#_Toc177760803)

[Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas 66](#_Toc177760804)

[Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 67](#_Toc177760805)

[Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 68](#_Toc177760806)

[Tabel 4.9 Hasil Uji Kelayakan Model 70](#_Toc177760807)

[Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Parsial 71](#_Toc177760808)

[Tabel 4.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 73](#_Toc177760809)

# DAFTAR GAMBAR

Hal

[Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 41](#_Toc177762716)

[Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal 57](#_Toc177762831)

# DAFTAR LAMPIRAN

Hal

[Lampiran 1. Instrumen Penelitian 93](#_Toc175650616)

[Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian 99](#_Toc175650617)

[Lampiran 3. Output Olah Data 142](#_Toc175650618)

[Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 149](#_Toc175650619)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kurniawan (2018:1-2)menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan “Salah satu pelakon usaha ekonomi yang memiliki andil yang besar dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai pemegang peran besar dalam membantu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.” Sampai saat ini jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat dan berkembang dengan pesat di berbagai macam sektor terutama pada bidang *Food and Baverage*. Mengenai kategorisasi UMKM sendiri, UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mengkategorikan suatu usaha sebagai usaha mikro jika memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet (keuntungan) 300 juta per tahun; usaha kecil jika memiliki aset lebih dari 50-500 juta dengan omzet (keuntungan) mencapai 2,5 miliar per tahun; dan usaha menengah jika aset yang dimiliki lebih dari 500 juta -10 miliar dengan omzet (keuntungan) mencapai 50 miliar per tahunnya.

Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini di mana semakin maraknya jumlah UMKM di Indonesia tak jarang para pelakon UMKM ini memiliki banyak keterbatasan dan kesulitan dalam akses permodalan baik di lembaga konvensional seperti bank atau koperasi (Liputan6.com, 2024). Padahal menurut Sari et al. (2023:3608) “Modal memiliki peran penting dalam aktivitas bisnis, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai alat pengukur tingkat pendapatan usaha.” Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan permodalan antara lain keterbatasan akses keuangan, kurangnya keterampilan manajemen, dan persaingan yang ketat (Aniversari, 2023). Hal ini terlihat dari kesulitan yang dialami oleh banyaknya pelaku UMKM dalam mendapatkan pinjaman dari bank atau sumber pembiayaan lainnya. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman karena kurangnya data diri yang lengkap, proses yang lama dan sulit, atau keterbatasan dalam membaca dan menulis. Selain itu, ada juga pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan modal yang dimiliki atau mengembangkan usaha mereka karena modal yang terbatas (Liputan6.com, 2024).

Berbagai persoalan mengenai permodalan UMKM tersebut pun kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh para pelaku politik. Berkenaan dengan musim politik yang sedang berlangsung, berbagai tawaran melalui kampanye pun digaungkan oleh para politisi, salah satunya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kampanyenya pada 8 Januari 2024, beliau menjanjikan lapangan kerja dan modal untuk UMKM untuk pelaku UMKM di Kabupaten Tegal (TvOnenews.com, 2024). Lalu pada 30 Januari 2024, Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga melakukan kampanye di Lapangan Pendawa, Slawi, Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh kerumunan massa pendukungnya tidak terkecuali oleh pelaku UMKM yang ikut ketiban rezeki besar dengan berjualan pada acara kampanye tersebut (Kompas.com, 2024).

Meskipun telah ditawari berbagai program bantuan permodalan atau merasakan dampak positif dari kehadiran politisi, perlu diingat bahwa janji-janji politik tersebut harus dievaluasi secara kritis dan realistis, karena tidak semua janji dapat dipenuhi dan tidak semua program dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memperhatikan dengan cermat program dan janji-janji politik yang ditawarkan oleh para politisi, serta melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu mencari sumber pembiayaan dan dukungan lainnya yang dapat membantu pengembangan usaha mereka, seperti melalui lembaga keuangan mikro atau program pemerintah yang telah terbukti efektif (Liputan6.com, 2024).

Seiring dengan permasalahan permodalan yang hingga kini masih menjadi momok bagi pelaku UMKM, zaman pun terus berkembang menghadirkan banyak alternatif dan juga faktor yang dapat mempengaruhi solusi dari persoalan permodalan UMKM itu sendiri. Sebut saja hadirnya *financial technology* atau yang akrab disebut *fintech,* adanya intervensi pemerintah, keharusan memahami struktur aset, dan hadirnya pembiayaan *murabahah* sebagai alternatif dari kesulitan akses kredit di bank konvensional. Dikutip dari laman resmi Redaksi OCBC NISP (2021), “*Fintech* adalah singkatan dari *financial technology* yang berarti teknologi keuangan.” Jadi, sebenarnya adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Lebih lanjut terkait dengan solusi permodalan UMKM, Redaksi OCBC NISP (2021) menjelaskan bahwa *Fintech* menawarkan dua jenis pembiayaan yakni *P2P Lending* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan tradisional serta *micro finance* yang fokus kepada pemberian akses keuangan kepada pelaku usaha mikro.

Peraturan terkait *fintech* di Indonesia sendiri diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Dengan perkembangan *fintech* yang pesat, akses pendanaan bagi UMKM menjadi lebih mudah dan transaksi keuangan menjadi lebih efisien serta mudah dilakukan namun tentunya tak luput dari risiko. *Fintech* sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan permodalan bagi UMKM. Dengan demikian, *fintceh* diharapkan menjadi altenatif solusi bagi UMKM untuk memperoleh permodalan (Andaiyani et al., 2020). Penjelasan yang kurang lebih sama disampaikan Pertiwi (2021) serta Hasanah (2023) bahwa *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. *Fintech* membuat UMKM lebih mudah dalam mengakses sumber pendanaan, pembayaran digital, memperluas cakupan pasar dan mengatasi masalah pelaporan keuangan.

Selanjutnya, terkait dengan intervensi pemerintah di mana intervensi dalam hal ini berkenaan dengan pemberian akses modal/pinjaman modal usaha terhadap UMKM. Furqan & Nizham (2021:65) serta Sari et al. (2023:3610) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa “Intervensi pemerintahini memberikan pengaruh positif terhadap permodalan UMKM dengan catatan pelaku UMKM harus memiliki literasi keuangan yang baik.” Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya (Harjowiryono & Siallagan, 2021). Pemerintah kemudian dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan modal usaha, pemberian pinjaman tanpa agunan, pemberian fasilitas promosi, hingga pendampingan penjualan produk agar modal UMKM dapat terus berputar secara konsisten (Maharani & Nurlukman, 2023).

Pengetahuan akan struktur aset juga menjadi salah satu solusi terhadap permodalan. Hal ini berkenaan dengan perimbangan aset lancar dan aset tetap, di mana UMKM dengan porsi aset lancar lebih besar dibanding aset tetap akan lebih mampu memodali aktivitas usahanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Salsabila & Andarwati (2019:13) “Bahwa pelaku UMKM ketika memiliki keuntungan mereka cenderung langsung mengalihkannya kepada pembelian aset tetap tanpa mempertimbangkan kelanjutan usahanya terlebih dahulu.” Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa Struktur Aset berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal UKM (Salsabila & Andarwati, 2019).

Terakhir, terkait dengan pembiayaan *murabahah,* merupakan pembiayaan yang diperoleh melalui skema pinjaman modal usaha dari BMT terdekat/setempat atau bank syariah. Pembiayaan *murabahah* ini memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai solusi permodalan UMKM karena memiliki prosedur yang tidak terlalu sulit dibanding harus prosedur pinjaman pada koperasi atau bank konvensional. Siregar et al. (2022:28) dalam penelitiannya pun mengungkapkan bahwa “Pembiayaan *murabahah* memberikan dampak positif terhadap permodalan UMKM.” Artinya, Kurangnya modal dapat didapatkan dari Lembaga keuangan yang berperan sebagai penyedia modal bagi pelaku UMKM dengan cara pengaliran dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Tujuan bank sebagai pengalir dana yaitu agar pelaku UMKM dapat meningkatkan akses pembiayaan (Rachmawati & Yasin, 2022).

Solusi bagi permasalahan permodalan UKM di Kabupaten Tegal menjadi sangat vital mengingat pertumbuhan UKM kini sangat tinggi (Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2022b). Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian terkait dengan pengaruh *financial technology*, intervensi pemerintah, struktur aset dan pembiayaan murabahah terhadap solusi permodalan UKM khusunya bidang *Food and Beverages* berskala mikro dan kecil yang terdapat di Kabupaten Tegal.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini kemudian akan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *financial technology* berpengaruh terhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal?
2. Apakah intervensi pemerintahberpengaruh terhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal?
3. Apakah struktur asetberpengaruh terhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal?
4. Apakah pembiayaan murabahahberpengaruh terhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini merujuk kepada rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *financial technology* terhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh intervensi pemerintahterhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur asetterhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahahterhadap solusi permodalan UKM bidang *food and beverages* di Kabupaten Tegal.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pengaruh penggunaan *fintech,* intevensi pemerintah, struktur aset, dan pembiayaan murabahah terhadap solusi permodalan UKM khususnya pada sektor *food and beverages* di Kabupaten Tegal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan permasalahan permodalan yang dialami oleh UKM di Kabupaten Tegal kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tegal agar kiranya segera dibuatkan solusi dan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat UKM telah menjadi salah satu penopang perekonomian yang sangat masif.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi penggerak bagi pemerintah dan juga UKM agar bisa duduk bersama merumuskan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada khususnya terkait dengan permodalan. Urgensi ini sangat vital, mengingat UKM harus mendapatkan perhatian lebih agar tidak “Mati” karena modal dan agar produk dan pemasaran mereka dapat lebih berkembang lagi secara berkelanjutan.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

### Financial Technology (Fintech)

Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Raharjo (2022:25) menyatakan bahwa “*Fintech* adalah industri yang menggunakan teknologi Informasi atau TI *mobile-centric* untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan.” *Fintech* dapat disimpulkan sebagai “Istilah yang menggabungkan antara kata keuangan dan teknologi yang secara kolektif mengacu pada perubahan dalam industri yang disebabkan adanya penggabungan layanan keuangan dan TI.” Ningsih (2020:274) menyatakan bahwa:

“Dengan adanya *fintech* transaksi yang semulanya konvensional sekarang berubah menjadi moderat yang dahulu membayar harus bertatap muka dan membawa uang cash, namun kini pembayaran dapat dilakukan dengan cepat menggunakan aplikasi yang tersedia.”

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 disebutkan bahwa:

“*Fintech* adalah penggunaan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk layanan teknologi dan model bisnis baru guna meningkatkan stabilitas keuangan, stabilitas efisiensi dan kelancaran keamanan sistem keuangan, dan keamanan sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia *fintech* muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat dimana penggunaan teknologi informasi menjadi arus utama dan masyarakat sekarang menuntut gaya hidup yang lebih cepat dan instan. Dengan menggunakan *fintech*, masyarakat dapat meminimalisir permasalahan transaksi jual beli dan pembayaran.”

Secara singkatnya, *fintech* membantu menjadikan transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien, ekonomis dan efektif .Definisi *fintech* juga dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tepatnya Pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan:

“*Financial Technology* adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Fintech* adalah penggunaan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk layanan teknologi dan model bisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan, stabilitas efisiensi, dan kelancaran keamanan sistem keuangan, serta keamanan sistem pembayaran. Fintech merupakan hasil pencampuran antara jasa keuangan dan jasa teknologi, yang memungkinkan berbagai kegiatan finansial seperti transfer dana, pembayaran, hingga peminjaman dana dilakukan lebih cepat.

* 1. Regulasi *Fintech* di Indonesia

Regulasi *fintech* di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dalam *website* resminya menyebutkan beberapa regulasi terkait *fintech* seperti:

1. Peraturan BI No.18/40/2016 tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
3. Peraturan BI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
4. Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggraan teknologi finansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *P2P Lending*) yang akhirnya memiliki aturan turunan berupa Surat edaran OJK nomor 18/SEOJK.02/2017 yang mengatur tentang salah satu jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia yakni *Peer-to-Per Lending*. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan menilai perlunya pengawasan dan pengaturan kegiatan *fintech* dalam pinjam meminjam guna mengendalikan pinjam meminjam dana di masyarakat. Perusahaan *P2P Lending* ini masuk kedalam lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan ini menjalankan pelayanan jasa keuangan, tetapi perusahaan belum memiliki dasar hukum kelembagaan dalam menjalankan tugasnya.

* 1. **Konsep *Fintech Peer to Peer Lending***

Wardhana et al. (2023:134)mengemukakan bahwa “*Peer-to-Peer lending* adalah salah satu inovasi teknologi khususnya dibidang pinjaman/pendanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Kehadiran teknologi keuangan ini memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses pinjaman untuk memajukan usahanya atau memnuhi kebutuhannya. Otoritas Jasa Keuangan (2016:15) tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengemukakan bahwa:

“Layanan peminjaman dan pembiayaan uang berbasis TI adalah penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminham untuk melakukan perjanjian pinjaman dan kredit dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik di jaringan internet.”

Berdasarkan peraturan ini sasaran pengguna layanan ini adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dan untuk pemberi pinjaman adalah perusahaan luar negeri. Dalam kegiatan ini ada dua kontrak perjanjian yang terjadi, yaitu antara peminjam dan pemberi pinjaman dan penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kontrak ini dibuat dalam bentuk dokumen elektronik untuk menjamin kejelasan transaksi. Dokumen kontrak dibuat dengan tanda tangan elektronik dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Selanjutnya masih menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016:17) LPMUBTI menyebutrkan bahwa “Kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* P2PL menjadikannya sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat khsuusnya pembiayan UMKM.” Dalam aktivitasnya, sistem *fintech* P2PL sangat mudah diakses oleh orang, hal ini dapat menimbul risiko yang besar. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas dan melindungi pengguna P2PL maka diadakannya pembatasan pemberian pinjaman sebesar RP.2.000.000.000,-

* 1. **Dimensi dan Indikator *Fintech***

Merujuk pada penelitian Andaiyani et al. (2020:87)**,** berikut disajikan dimensi dan indikator dari *fintech*.

1. Cepat
   1. Pengajuan berkas diproses dengan cepat
   2. Pencairan dana dilakukan dengan cepat
2. Efisien
   1. Tidak perlu datang ke bank/lembaga lainnya
   2. Pengajuan bisa dilakukan kapan saja
3. Mudah di Akses
   1. Aplikasi/situs bisa diakses kapan saja
   2. Bisa diakses dari mana saja
   3. **Layanan *Fintech* Bagi UMKM**

Otoritas Jasa Keuangan et al. (2021:36-37) menyatakan bahwa “Ada beberapa layanan *fintech* yang tersedia,” Berikut adalah layanan *fintech* yang bisa digunakan bagi pelaku usaha UMKM, antara lain:

1. Pinjaman Modal

Perusahaan *fintech* menawarkan layanan pembiayaan modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan tradisonal seperti bank, tanpa perlu menyerahkan agunan dan lebih sedikit dokumen yang dipenuhi. Layanan pinjaman online ini merupakan alternatif dari pinjaman tradisonal atau konvensional dari bank dan perusahaan pinjaman lainnya. Pinjaman yang diajukan dapat dilunasi dalam waktu singkat.

1. Layanan pembayaran

Perusahaan *fintech* juga menawarkan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pelaku bisnis. Proses pembayaran yang sederhana dan aman memungkinkan dapat menarik lebih banyak konsumen dan menguntungkan para pelaku bisnis. Salah satu *fintech* yang menawarkan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang bekerja sama dengan penyedia layanan trasnportasi online.

1. Layanan manajemen keuangan

Ada beberapa aplikasi yang menyediakan layanan pengelolaan keuangan. Inovasi ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya. Inovasi ini ditujukan untuk membantu UMKM mengelola keuangan perusahaannya. Layanan yang ditawarkan meliputi pembukuan pengeluaran, pemantapan kinerja investasi, dan nasihat keuangan gratis. Jika beberapa layanan fintech tersebut diperkenalkan kedalam bisnis perbankan, maka pelaku usaha akan lebih mudah mengakses produk-produk yang ditawarkan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan ini akan bersifat komprehensif dan artinya seluruh produk yang ditawarkan akan tersedia bagi para pelaku usaha.

### Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. **Definisi UMKM**

Sanjaya & Nuratama (2021:4) dalam bukunya mendefinisikan UMKM sebagai:

“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Selanjutnya Indriasih et al. (2023:12) menyatakan bahwa “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang berskala kecil yang dapat dijalankan bagi sekumpulan keluarga maupun kelompok perorangan dengan tujuan mendirikan suatu usaha. Menurut kriteria yang ditetapkan, UMKM bukanlah cabang atau anak perusahaan, melainkan bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan.” Kemudian menurut UU No. 20/2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak lansgung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. **Kriteria UMKM**

UMKM memiliki kriteria yang tertuang dalam UU No. 20/2008 sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Ciri usaha mikro sendiri adalah jenis produk yang ditawarkan tidak selalu tetap, pelaku usaha biasanya tidak meiliki izin atau persyaratan hukum lainnya seperti kepemilikan NPWP, tempat usaha bisa saja berpindah-pindah, tidak adanya sistem pembukuan atau pengelolaan keuangan dasar dan tidak memisahkan keuangan rumah tangga dengan hasil penjualan.
2. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebuh dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) .Usaha Kecil sendiri memiliki ciri di mana pendidikan para pelaku usaha setara dengan SMA dan memiliki pengalaman usaha, sudah mulai mengenal pembukuan keuangan walaupun sederhana, sebagian sudah memiliki NPWP dan persyaratan legalitas usaha, sudah menjalin hubungan dengan perbankan namun belum bisa membuat sebuah rencana bisnis sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi, dan sudah memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang
3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah. Usaha Menengah sendiri telah mengenal dan memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur dan modern dan memiliki pembagian tugas yang jelas mana bagian keuangan pemasaran dan produksi. Sudah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan aturan untuk mempermudah proses auditing. Sudah memiliki segala akses legalitas, dan umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
4. **Permodalan UMKM**

Gusriyana et al. (2023:276)dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh permodalan dan teknologi terhadap produktivitas usaha UMKM di Bidang Keajinan Tangan Kecamatan Jelutung menjelaskan bahwa:

“Modal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi karena dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi ketika memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang besar, namun tidak memiliki modal yang cukup dapat mempengaruhi kelancaran operasional usaha dan mempengaruhi keuntungan. Modal memegang peranan yang sangat penting dalam memulai suatu usaha. Kebutuhan permodalan harus disesuaikan dengan perusahaan yang akan dibentuk.”

Lalu kemudian Supriadi et al. (2023:53) mengemukakan bahwa “Sumber modal adalah sesuatu yang mempunyai daya beli, dan kekuasaan untuk menggunakan sesuatu yang bernilai, seperti uang dan peralatan yang digunakan untuk memulai suatu usaha.” Dengan demikian, sumber modal sendiri dapat diartikan dari mana uang atau peralatan itu diperoleh. Jenis sumber modal bisa berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri biasanya dari tabungan yang dimiliki oleh pemilik usaha, modal pinjaman berasal dari pinjaman pada lembaga keuangan, atau pada pihak lainnya. Permodalan UMKM ini kemudian dapat diukur berdasarkan dimensi dan indikator dari Nuzuri & Andriani (2018:8)sebagai berikut:

1. Struktur permodalan
   1. Mengetahui kebutuhan usaha
   2. Mengetahui jumlah yang harus disiapkan
2. Pemanfaatan modal tambahan
   1. Mengetahui tujuan dari modal tambahan
   2. Mengetahui cara memanfaatkan modal tambahan
3. Hambatan aksesibilitas modal eksternal
   1. Mengetahui faktor eksternal yang menghambat permodalan
   2. Memiliki alternatif aksesibilitas
4. Keadaan usaha setelah penanaman modal
   1. Memiliki proyeksi masa depan terkait usaha
   2. Siap terhadap segala sesuatu pasca penanaman modal

### Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Ridwan & Nawir (2021:29)menjelaskan bahwa “Adanya regulasi yang memadai berupa undang-undang UMKM dan peraturan pemerintah di bidang manufaktur dan perbankan akan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian”. Secara spesifik, Huda (2019:82-83) menjelaskan bahwa:

“Manfaat peraturan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu negara sebagai regulator dan pengusaha sebagai pemegang izin. Izin diperlukan bagi pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat luas. Bagi pengusaha, perizinan harus membawa manfaat sosial dan ekonomi. Evaluasi kebijakan tidak hanya memberikan kesimpulan sejauh mana permasalahan telah terselesaikan, namun juga memberikan saran untuk memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari kebijakan, mendukung penyesuaian dan reformulasi permasalahan.”

Sari et al. (2023:3608)dalam risetnya juga mengemukakan bahwa:

“Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan perekonomian, guna mencapai pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan.”

Harmadi (2020:68-70) kemudian menguraikan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai *intermediary*, regulator dan katalisator dalam pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai intermediary atau fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah berperan membantu UMKM mencapai tujuan pengembangan usahanya. Jika suatu UMKM mempunyai kelemahan pada bidang produksi, maka tugas fasilitator adalah memberikan keterampilan kepada UMKM tersebut melalui berbagai cara seperti pelatihan. Demikian pula jika pembiayaan UMKM lemah, maka tugas fasilitator adalah mencari cara untuk membantu UMKM menggalang pembiayaan yang dibutuhkan. Namun hal ini perlu dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM semakin membaik tanpa ketergantungan. Pertama, pemerintah pada awalnya dapat memberikan sesuatu baik dalam bentuk uang atau subsidi untuk barang dan jasa. Kedua, sebuah keistimewaan, baik dalam bentuk fasilitasi maupun kekuatan dalam persoalan lintas yurisdiksi. Ketiga: kebijakan tersendiri.

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator memberikan pedoman untuk memfasilitasi pengembangan usaha UMKM. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menjaga kondisi bisnis yang menguntungkan bagi investasi dengan mengatur suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan menetapkan pedoman aturan persaingan bagi dunia usaha. Pemerintah merupakan pihak yang dapat menegakkan aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam menjalankan fungsi regulasi, pemerintah membagi kewenangan pengambilan kebijakan menjadi dua bagian: lembaga pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap pemerintah daerah didaerahnya.

1. Pemerintah sebagai katalisator

Dalam arti sebenarnya, katalis adalah zat yang ditambahkan ke suatu reaksi untuk meningkatkan lajunya. Berdasarkan hal tersebut maka peran Pemda sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses pengembangan UMKM menjadi usaha yang berkembang pesat. Perusahaan yang bergerak cepat sudah menjadi UMKM yang berjiwa wirausaha, mentransformasikan perusahaan menjadi usaha besar. Untuk mengkatalisasi perkembangan pesat perusahaan, pemerintah daerah mungkin terlibat dalam proses, namun mereka tidak terlibat dalam mengelola seluruh proses perubahan.

Pelibatan pemerintah daerah dalam seluruh proses transformasi sebaiknya tidak dilakukan. karena jika peran pemerintah terlalu terlibat dalam kegiatan perekonomian, maka pasar tidak mampu melakukannya dan perekonomian kembali menjadi tidak efisien. Sebagai katalisator, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, yaitu dengan cara memberdayakan komunitas kreatif agar produktif dibandingkan konsumtif, memberikan *reward* kepada UMKM, infrastruktur intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual), dan modal usaha dan perputaran, menghormati modal, termasuk permodalan (Harmadi, 2020:71).

Variabel intervensi pemerintah ini kemudian menurut Ahmad et al. (2022:40)dapat diukur melalui dimensi dan indikator berikut ini:

1. Nilai Transfer
   1. Nilai bantuan disampaikan secara terbuka
   2. Nilai bantuan dibebaskan dari bunga dan pajak
2. Transfer Faktor
   1. Menghilangkan faktor yang menghambat
   2. Memudahkan proses
3. Proteksi Nominal
   1. Menjaga nilai bantuan agar tidak dikurangi pihak manapun
   2. Mengawasi nilai bantuan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

### Struktur Aset

Sanjaya & Nuratama (2021:85)mendefinisikan bahwa “Aset ialah sebuah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam proses operasional.” Aset merupakan faktor yang menentukan tingkat alokasi setiap komponen aset. Struktur aset terdiri dari dua elemen penting yakni aset tetap dan aset lancar. Otoritas Jasa Keuangan et al. (2021:29) menjelaskan bahwa “Struktur aset mengacu pada struktur aset tetap, atau perbandingan mutlak dan relatif antara aset lancar dan aset tetap.” Apa yang dimaksud dengan “Mutlak” adalah perbandingan dalam bentuk persentase. Supriadi et al. (2023:47) kemudian menambahkan bahwa:

“Struktur aset menggambarkan perbandingan antara total aset tetap dengan total aset perusahaan. Perbandingan antara jumlah aset tetap dengan jumlah aset adalah untuk mengalokasikan kas yang dikeluarkan untuk pendanaan operasional dari risiko kebangkrutan.”

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa struktur aset disini didefinisikan sebagai seberapa besar atau berpengaruhnya aset tetap yang mendominasi komposisi kekayaan perusahaan. Komponen aset di bagi menjadi aset lancar seperti investasi jangka pendek, kas, piutang dagang, wesel tagih, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan, biaya yang akan diterima dimuka. Sedangkan untuk aktiva tetap yaitu ada tanah dan bangunan, tanah, mesin, kendaraan. Variabel struktur aset ini kemudian dapat diukur dengan dimensi dan indikator dari Laily et al. (2022:108)sebagai berikut:

1. Alokasi dana untuk komponen aset lancar
   1. Mendata kebutuhan aset lancar
   2. Menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk pembelian aset lancar
2. Alokasi dana untuk komponen aset tetap
   1. Mendata kebutuhan aset tetap
   2. Menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk pembelian aset tetap

### Pembiayaan Murabahah

* 1. **Definisi Murabahah**

Arifin (2021:51)menyatakan bahwa “Murabahah adalah akad penjualan suatu barang tertentu dimana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan syarat diharapkan memperoleh keuntungan tertentu.” Nugroho (2022:4-5) kemudian menambahkan bahwa:

“Murabahah adalah produk perbankan syariah yang dirancang untuk membiayai pembelian barang dalam dan luar negeri. Pinjaman ini mirip dengan pinjaman modal kerja di bank biasa atau konvensional, karena jangka waktu pinjamannya adalah satu tahun atau kurang. Bank memperoleh keuntungan dari harga produk atas nama nasabah dan menambahkan markup sebelum menjual produk berdasarkan biaya ditambah keuntungan.”

Arifin (2021:60-61) kemudian mengemukakan bahwa Bank dapat menentukan jatuh tempo maksimum pinjaman Murabahah dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Tingkat margin saat ini diperkirakan akan berubah di masa depan dan hal ini berlaku pada operasional perbankan syariah (harga pasar yang bersaing secara langsung) Semakin dini perubahan DCRM (*Direct Competitor Market Rate*) diprediksi, semakin pendek periode pendanaan maksimumnya.
2. Suku bunga pinjaman saat ini adalah dan perubahan di masa depan yang berlaku pada pasar perbankan konvensional (ICRM). Semakin dini perubahan ICRM diantisipasi, semakin pendek jangka waktu pendanaannya.
3. Distribusi keuntungan yang diharapkan kepada pihak ketiga Daya saing di pasar perbankan syariah ECRI (*Expected Competitive Return Of Investors*). Semakin besar perubahan yang diharapkan pada ECRI, semakin pendek jangka waktu pinjaman maksimum
   1. **Rukun dan Syarat Murabahah**

Otoritas Jasa Keuangan (2022:21-23)menyatakan bahwa rukun dan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Rukun Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad pinjaman murabahah, terlebih dahulu harus dipenuhi rukun dan syarat tertentu menurut hukum Islam. Oleh karena itu, karena murabahah menggunakan akad jual beli, maka Murabahah harus memiliki harmonisasi dan syarat penjualan seperti seperti di bawah ini:

1. Ba’i atau penjual, Penjual disini adalah orang yang memiliki produk atau menyediakan produk.
2. Musytari atau pembeli, seseorang yang memberikan permintaan terhadap barang yang dijual oleh si penjual.
3. Mabi’ atau barang, sesuatu atau sebuah komoditi yang dijualbelikan.
4. Tsaman atau harga jual, gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan harga atau nilai suatu barang yang dijual.
5. Ijab dan Qabul yang ada didalam akad.
6. Syarat Murabahah
7. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) paham dengan hukum, ridho atau sukarela tidak terpaksa.
8. Objek yang di jual beli adalah barang yang tidak diharamkan atau dilarang oleh agama, termasuk barang yang memiliki nilai atau manfaat, dapat dilakukan penyerahan barang tersebut dari penjual ke pembeli, hak miliknya penuh bagi pihak yang melaksanakan akad, sesuai dengan kemauan yang diminta pembeli, jika barang tersebut barang bergerak maka harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai.
9. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul) disebutkan dengan lantang dan jelas dengan siapa berakad, serah terima harus berjalan dengan baik dan menyepakati barang serta harganya, tidak diragukan keaslian transaksinya pada masa depan, tidak membatasi waktu.
10. Harga jual adalah harga beli ditambahkan dengan margin, tidak diperbolehkan mengganti harga jual selama masa perjanjian, pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak.
    1. **Dimensi dan Indikator Pembiayaan Murabahah**

Dimensi dan indikator pembiayaan murabahah menurut Rizky (2022:3) disajikan sebagai berikut:

1. Kesepakatan
   1. Menyepakati jenis akad
   2. Menyepakati nilai pembiayaan
2. Margin keuntungan
   1. Menyepakati besaran margin keuntungan
   2. Menyepakati metode pembagian keuntungan
3. Cara pembayaran
   1. Menyepakati metode pembayaran tetap
   2. Menyepakati jumlah yang dibayarkan
4. Penerimaan barang
   1. Menyepakati metode penerimaan barang/dana
   2. Menyepakati kapan dana akan dicairkan

### Financial Behavioral Theory

Menurut Siahaan & Seno (2022:5) “Teori ini merupakan pendekatan yang mempertimbangkan aspek psikologis dan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan keuangan.” Teori ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengambil tindakan pada proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi sebagai respon dari informasi yang diperolehnya. *Financial behavioral theory* adalah cara dimana individu mengelola sumber dana untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana, penentuan sumber dana, serta keputusan untuk perencanaan pensiun, dalam proses perencanaan tersebut harus di awali dengan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sehingga keputusan keuangan dapat diartikan sebagai proses memilih alternatif tertentu dari sejumlah alternatif (Suriani, 2022;13).

Pada dasarnya, persoalan-persoalan yang dihadapi pelaku UMKM terkait dengan permodalan lebih kepada masalah perilaku keuangan yang mana hal ini relevan dengan *behavioral financial theory* (Basrowi & Utami, 2024:25-26)*.* Pertama, *behavioral financial theory* menyoroti bagaimana bias dan emosi individu dapat mempengaruhi keputusan investasi. Misalnya, perilaku *overconfidence* (kelebihan keyakinan) dapat membuat pelaku UMKM merasa terlalu percaya diri dalam mengelola modalnya tanpa pertimbangan yang matang (Mubarok & Faqihudin, 2011). Selanjutnya, dalam *behavioral financial theory* tingkat literasi keuangan juga menjadi aspek penting. Pelaku UMKM yang kurang memahami konsep keuangan dan investasi cenderung rentan terhadap bias kognitif dan emosional yang dapat mempengaruhi keputusan permodalan mereka (Risman et al., 2021).

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Andaiyani et al. (2020) dalam penelitianya bahwa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir, pemahaman peserta setelah diberikan edukasi *Fintech* telah mencapai 70 %. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2020) *fintech lending* merupakan pengetahuan baru bagi sebagian besar warga Desa Wonoayu. Pemahaman warga mengenai pentingnya permodalan dalam usaha, fintech lending, meningkat secara berarti. *Fintech lending* dapat dijadikan solusi permodalan usaha untuk menghidupkan perekonomian warga baik saat maupun pasca pandemi covid-19.

Selanjutnya, Harjowiryono & Siallagan (2021) dalam risetnya menemukan studi kasus ini menemukan bahwa pandemi covid-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Kemudian penelitian yang dilakukan (Kurniawan, 2018) menjelaskan bahwa Peningkatan modal UMKM melalui pembiayaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap debitur dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo memiliki dampak positif. Seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, hasil penelitian yang diperoleh mendapatkan kesimpulan yaitu dana bergulir yang merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat di Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki dampak positif baik dalam segi produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan bagi UMKM.

Penelitian selanjutnya yakni Ahmad et al. (2022) yang menerangkan bahwa hasil yang dicapai adalah perlunya peningkatan strategi pada Ways antara lain strategi yang tepat dimulai dengan kerangka regulasi dan insentif berupa kebijakan dalam perundangundangan, peraturan-peraturan pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan dalam membantu sektor UMKM agar tetap bertahan dan keluar dari kesulitan selama masa pandemi Covid-19 sehingga dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam penelitian lain, Natasya & Hardiningsih (2021) menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Kemudian Laily et al. (2022) dalam risetnya mengungkapkan bahwa variabel struktur aset berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh negatif terhadap struktur modal diterima dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

Penelitian kedelapan yang dilakukan Rizky (2022) menyimpulkan: variabel biaya ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan UMKM di BMT. Secara spesifik terkait dengan pembiayaan murabahah, Nuzuri & Andriani (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peran untuk mengubah pendapatan nasabah. Peran pembiayaan murabahah tampaknya pada tabel pendapatan pelanggan yang meningkat. Terakhir, Rizal et al. (2018) mengungkapkan bahwa masalah sumber pembiayaan merupakan masalah klasik bagi UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| **No** | **Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rizal et al. (2018) | Fintech as One of The Financing Solutions for SMEs | Masalah sumber pembiayaan merupakan masalah klasik yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan FinTech seperti peer-to-peer lending sekarang ini bisa menjadi alternatif lain bagi para pencari dana pinjaman. peer-to-peer lending merupakan bisnis pembiayaan yang menyasar sektor pasar menengah ke bawah. |
| 2 | Kurniawan (2018) | Analisis Dampak Modal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan (Studi pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo) | Peningkatan modal UMKM melalui pembiayaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap debitur dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo memiliki dampak positif. Seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, hasil penelitian yang diperoleh mendapatkan kesimpulan yaitu dana bergulir yang merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat di Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki dampak positif baik dalam segi produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan bagi UMKM. |
| 3 | Andaiyani et al. (2020) | Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir | Berdasarkan hasil kuesioner, pemahaman peserta setelah diberikan edukasi Fintech telah mencapai 70 % |
| 4 | Pratama et al. (2020) | Edukasi Fintech Lending sebagai Solusi Permodalan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wajak Malang | Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa *fintech lending* merupakan pengetahuan baru bagi sebagian besar warga Desa Wonoayu. Pemahaman warga mengenai pentingnya permodalan dalam usaha, fintech lending, meningkat secara berarti . *Fintech lending* dapat dijadikan solusi permodalan usaha untuk menghidupkan perekonomian warga baik saat maupun pasca pandemi covid-19. |
| 5 | Natasya & Hardiningsih (2021) | Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mendasarkan pengujian melalui pendekatan teori daya tarik industri. |
| 6 | Harjowiryono & Siallagan (2021) | Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 | Studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. |
| 7 | Ahmad et al. (2022) | Strategi Pemerintah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi | Hasil yang dicapai adalah perlunya peningkatan strategi pada Ways antara lain strategi yang tepat dimulai dengan kerangka regulasi dan insentif berupa kebijakan dalam perundangundangan, peraturan-peraturan pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan dalam membantu sektor UMKM agar tetap bertahan dan keluar dari kesulitan selama masa pandemi Covid-19 sehingga dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia |
| 8 | Laily et al. (2022) | Pengaruh Struktur Aset dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2020 | Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitianini dapat ditarik kesimpulan pengaruh struktur aset dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2020 yaitu sebagai berikut : 1) Variabel struktur aset berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh negatif terhadap struktur modal diterima. 2) Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas negatif terhadap struktur modal diterima |
| 9 | Nuzuri & Andriani (2018) | Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peran untuk mengubah pendapatan nasabah. Peran pembiayaan murabahah tampaknya pada tabel pendapatan pelanggan yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa pendapatan pelanggan meningkat sebesar 30%. |
| 10 | Rizky (2022) | Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) | Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan: variabel Biaya Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan UMKM di BMT dengan nilai t hitung > t tabel (4.207 > 1.993) dan nilai signifikan 0.000 < 0.05 |

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Sugiyono (2020:98), “Kerangka konseptual merupakan model yang menunjukkan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan berdasarkan variabel yang ada.” Selanjutnya, Notoadmodjo (2018:131) mendefinisikan “Kerangka konseptual sebagai kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.” Sampurna & Nindhia (2018:8) menjelaskan bahwa “Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabelvariabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan.” Definisi lain dari kerangka konseptual juga diungkapkan Putri (2022:31) yakni kerangka yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam kegiatan ilmu dan membantu peneliti menghubungkan temuan penelitian dengan teori.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual merupakan suatu model kerangka yang berfungsi memberikan informasi mengenai alur dan tujuan penelitian berdasarkan objek dan variabel yang ada dan dapat digunakan untuk menghubungkan hasil penelitian dan teori yang digunakan. Merujuk pada definisi tersebut, penelitian ini kemudian akan menyusun kerangka konsep terkait dengan permasalahan permodalan pada UMKM.

Seiring dengan permasalahan permodalan yang hingga kini masih menjadi momok bagi pelaku UMKM, zaman pun terus berkembang menghadirkan banyak alternatif dan juga faktor yang dapat mempengaruhi solusi dari persoalan permodalan UMKM itu sendiri. Sebut saja hadirnya *financial technology* atau yang akrab disebut *fintech,* adanya intervensi pemerintah, keharusan memahami struktur aset, dan hadirnya pembiayaan *murabahah* sebagai alternatif dari kesulitan akses kredit di bank konvensional. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka pemikiran konseptual dari variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

* + - 1. Pengaruh *Financial Technology* terhadap Solusi Permodalan UKM Bidang *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal

*Fintech* adalah penggunaan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk layanan teknologi dan model bisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan, stabilitas efisiensi, dan kelancaran keamanan sistem keuangan, serta keamanan sistem pembayaran. Fintech merupakan hasil pencampuran antara jasa keuangan dan jasa teknologi, yang memungkinkan berbagai kegiatan finansial seperti transfer dana, pembayaran, hingga peminjaman dana dilakukan lebih cepat.

Perkembangan *fintech* yang pesat sebagai akses pendanaan bagi UKM menjadi lebih mudah dan transaksi keuangan menjadi lebih efisien serta mudah dilakukan namun tentunya tak luput dari risiko. *Fintech* sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan permodalan bagi UMKM. Dengan demikian, *fintceh* diharapkan menjadi altenatif solusi bagi UMKM untuk memperoleh permodalan (Otoritas Jasa Keuangan et al., 2021:39). Penjelasan yang kurang lebih sama disampaikan Pertiwi (2021) serta Hasanah (2023) bahwa *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. *Fintech* membuat UMKM lebih mudah dalam mengakses sumber pendanaan, pembayaran digital, memperluas cakupan pasar dan mengatasi masalah pelaporan keuangan (Wardhana et al., 2023:46).

* + - 1. Pengaruh Intervensi Pemerintahterhadap Solusi Permodalan UKM Bidang *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal

Intervensi Pemerintah dalam hal ini berkenaan dengan pemberian akses modal/pinjaman modal usaha terhadap UMKM. Ridwan & Nawir (2021:29)menjelaskan bahwa “Adanya regulasi yang memadai berupa undang-undang UMKM dan peraturan pemerintah di bidang manufaktur dan perbankan akan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian”.

Harmadi (2020:68-70) kemudian menguraikan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai *intermediary*, regulator dan katalisator. Furqan & Nizham (2021:65) serta Fajri et al. (2021:108) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa “Intervensi pemerintahini memberikan pengaruh positif terhadap permodalan UMKM dengan catatan pelaku UMKM harus memiliki literasi keuangan yang baik.” Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya (Harmadi, 2020:68). Pemerintah kemudian dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan modal usaha, pemberian pinjaman tanpa agunan, pemberian fasilitas promosi, hingga pendampingan penjualan produk agar modal UMKM dapat terus berputar secara konsisten (Ridwan & Nawir, 2021:26).

* + - 1. Pengaruh Struktur Asetterhadap Solusi Permodalan UKM Bidang *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal

Pengetahuan akan struktur aset juga menjadi salah satu solusi terhadap permodalan. Sanjaya & Nuratama (2021:85)mendefinisikan bahwa “Aset ialah sebuah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam proses operasional.” Aset merupakan faktor yang menentukan tingkat alokasi setiap komponen aset. Struktur aset terdiri dari dua elemen penting yakni aset tetap dan aset lancar. Otoritas Jasa Keuangan et al. (2021:29) menjelaskan bahwa “Struktur aset mengacu pada struktur aset tetap, atau perbandingan mutlak dan relatif antara aset lancar dan aset tetap.” Apa yang dimaksud dengan “Mutlak” adalah perbandingan dalam bentuk persentase.

Struktur aset ini berkenaan dengan perimbangan aset lancar dan aset tetap, di mana UMKM dengan porsi aset lancar lebih besar dibanding aset tetap akan lebih mampu memodali aktivitas usahanya (Supriadi et al., 2023). Hal ini sebagaimana dijelaskan Salsabila & Andarwati (2019:13) “Bahwa pelaku UMKM ketika memiliki keuntungan mereka cenderung langsung mengalihkannya kepada pembelian aset tetap tanpa mempertimbangkan kelanjutan usahanya terlebih dahulu.” Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa Struktur Aset berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal UKM (Prabowo et al., 2019:116).

* + - 1. Pengaruh Pembiayaan Murabahahterhadap Solusi Permodalan UKM Bidang *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal

Pembiayaan *murabahah,* merupakan pembiayaan yang diperoleh melalui skema pinjaman modal usaha dari BMT terdekat/setempat atau bank syariah (Maretha & Indriasih, 2022;3). Arifin (2021:51)menyatakan bahwa “Murabahah adalah akad penjualan suatu barang tertentu dimana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan syarat diharapkan memperoleh keuntungan tertentu.”

Pembiayaan *murabahah* ini memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai solusi permodalan UMKM karena memiliki prosedur yang tidak terlalu sulit dibanding harus prosedur pinjaman pada koperasi atau bank konvensional (Nugroho, 2022:17). Siregar et al. (2022:28) dalam penelitiannya pun mengungkapkan bahwa “Pembiayaan *murabahah* memberikan dampak positif terhadap permodalan UMKM”.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, kerangka pemikiran konseptual penelitian ini kemudian disajikan dalam bagan berikut ini:

*Financial Technology* (X1)

Intervensi Pemerintah(X2)

Struktur Aset(X3)

Pembiayaan Murabahah(X4)

Solusi Permodalan UMKM(Y)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis tersebut dibuktikan kebenarannya melalui penggunaan rumus statistik yang ditentukan peneliti terhadap hipotesis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H1 | : | *Financial technology* berpengaruh positif terhadap solusi permodalan UKM Sektor *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal |
| H2 | : | Intervensi pemerintah berpengaruh positif terhadap solusi permodalan UKM Sektor *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal |
| H3 | : | Struktur aset berpengaruh positif terhadap solusi permodalan UKM Sektor *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal |
| H4 | : | Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap solusi permodalan UKM Sektor *Food and Beverage* di Kabupaten Tegal |

# BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2020:55) menjelaskan bahwa:

“Metode kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan cara, menganalisis mengumpulkan, dan menginterprestasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan dan interpretasi yang tepat.”

Lebih lanjut, Sugiyono (2020:64) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan sejumlah data yang berupa angka guna mejawab sebuah pertanyaan yang diuji hipotesisnya mengenai status terakhir subjek dari penelitiannya serta menguji variabel sebuah penelitian. Jenis penelitian ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan yakni guna mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan *fintech,* intervensi pemerintah, struktur aset, dan pembiayaan murabahahn terhadap solusi permodalan UKM sektor *food and beverages* di Kabupaten Tegal. Nantinya, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya berdasarkan analisis regresi yang menjadi metode analisis dalam penelitian ini.

1. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Tabel 3.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** | **Sumber** |
| Solusi Permodalan UMKM | Struktur Permodalan | 1. Mengetahui kebutuhan usaha 2. Mengetahui jumlah yang harus disiapkan | Interval | (Nuzuri & Andriani, 2018:8) |
| Pemanfaatan Modal Tambahan | 1. Mengetahui tujuan dari modal tambahan 2. Mengetahui cara memanfaatkan modal tambahan |
| Hambatan aksesibilitas modal eksternal | 1. Mengetahui faktor eksternal yang menghambat permodalan 2. Memiliki alternatif aksesibilitas |
| Keadaan usaha setelah penanaman modal | 1. Memiliki proyeksi masa depan terkait usaha 2. Siap terhadap segala sesuatu pasca penanaman modal |
| *Financial Technology* | Cepat | * + - 1. Pengajuan berkas diproses dengan cepat       2. Pencairan dana dilakukan dengan cepat | Interval | (Andaiyani et al., 2020:87) |
| Efisien | * + - 1. Tidak perlu datang ke bank/lembaga lainnya       2. Pengajuan bisa dilakukan kapan saja |
| Mudah Diakses | * + - 1. Aplikasi/situs bisa diakses kapan saja       2. Bisa diakses dari mana saja |
| Intervensi Pemerintah | Nilai Transfer | 1. Nilai bantuan disampaikan secara terbuka 2. Nilai bantuan dibebaskan dari bunga dan pajak | Interval | (Ahmad et al., 2022:40) |
| Transfer Faktor | 1. Menghilangkan faktor yang menghambat 2. Memudahkan proses |
| Proteksi Nominal | 1. Menjaga nilai bantuan agar tidak dikurangi pihak manapun 2. Mengawasi nilai bantuan agar dipergunakan sebagaimana mestinya |
| Struktur Aset | Alokasi Dana untuk Komponen Aset Lancar | 1. Mendata kebutuhan aset lancar 2. Menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk pembelian aset lancar | Interval | (Laily et al., 2022:108) |
| Alokasi Dana untuk Komponen Aset Tetap | 1. Mendata kebutuhan aset tetap 2. Menganggarkan dan mengalokasikan dana untuk pembelian aset tetap |
| Pembiayaan Murabahah | Kesepakatan | 1. Menyepakati jenis akad 2. Menyepakati nilai pembiayaan |  | (Rizky, 2022:3) |
| Margin  Keuntungan | 1. Menyepakati besaran margin keuntungan 2. Menyepakati metode pembagian keuntungan |
| Cara Pembayaran | 1. Menyepakati metode pembayaran tetap 2. Menyepakati jumlah yang dibayarkan |
| Penerimaan Barang | 1. Menyepakati metode penerimaan barang/dana 2. Menyepakati kapan dana akan dicairkan dan kapan harus melakukan pelunasan |

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan kuisioner dalam proses pengumpulan data. Sugiyono (2020:142) menjelaskan bahwa “Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” Kuisioner yang akan dibagikan nantinya akan disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Sebelum dibagikan, kuisioner tersebut akan terlebih dahulu melalui pengujian validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa kuisioner tersebut layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Sugiyono (2020:113) mendefinisikan populasi sebagai “Suatu wilayah umum yang mencakup objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.” Artinya. populasi bukan sekedar jumlah obyek yang diteliti tetapi mencakup seluruh ciri-ciri yang dimiliki oleh obyek tersebut. tertentu. Menurut data yang berada di website resmi Pemerintah Kabupaten Tegal jumlah UKM yang ada di Kabupaten Tegal dari berbagai sektor ada sebanyak 5.034 UKM. Sedangkan khusus untuk sektor *Food and Beverages,* tercatat ada 2.632 UKM sebagaimana rilis informasi dari website resmi Pemerintah Kabupaten Tegal.

1. **Sampel**

Sugiyono (2020:117)menyatakan bahwa “Sampel adalah sebagian dari populasi itu sendiri.” Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka perlu untuk pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini digunakan karena target penelitian telah memiliki kejelasan baik itu segi kriteria maupun jumlah dalam bentuk angka. Adapun untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan, akan digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Derajat ketelitian atau nilai kritis (5%)

Perhitungan jumlah sampel penelitian ini kemudian disajikan sebagai berikut:

=

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin di atas, maka banyaknya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 347 UKM Sektor *Food and Beverages*. Adapun kriteria sampel yang harus dipenuhi yaitu:

1. Merupakan UKM Sektor *Food and Beverages* yang berdomisili asli di Kabupaten Tegal.
2. Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun.
3. Menggunakan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan permodalan
4. Mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk permodalan
5. Memiliki kredit/pembiayaan murabahah baik dari koperasi, bank, ataupu institusi keuangan lainnya.

Menurut Bappeda.tegalkab.go.id , wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, maka akan ada 19-20 UKM Sektor *Food And Baverage* di Kabupaten Tegal di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal yang telah memenuhi kriteria sampel. Berikut adalah pembagian tabel pembagian sampel:

Tabel 3.1 Tabel Pembagian Sampel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Wilayah | Jumlah Sampel |
| 1. | Kecamatan Margasari | 20 |
| 2. | Kecamatan Bumijawa | 20 |
| 3. | Kecammatan Bojong | 20 |
| 4. | Kecamatan Balapulang | 20 |
| 5. | Kecamatan Pagerbarang | 20 |
| 6. | Kecamatan Lebaksiu | 19 |
| 7. | Kecamatan Jatinegara | 19 |
| 8. | Kecamatan Kedungbanteng | 19 |
| 9. | Kecamatan Pangkah | 19 |
| 10. | Kecamatan Slawi | 19 |
| 11. | Kecamatan Dukuhwaru | 19 |
| 12. | Kecamatan Adiwerna | 19 |
| 13. | Kecamatan Dukuhturi | 19 |
| 14. | Kecamatan Talang | 19 |
| 15. | Kecamatan Tarub | 19 |
| 16. | Kecamatan Kramat | 19 |
| 17. | Kecamatan Suradadi | 19 |
| 18. | Kecamatan Warureja | 19 |

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
2. **Pengujian Validitas Instrumen**

Pengujian ini merupakan “Pengukuran terhadap kualitas kuesioner yang dipergunakan sebagai instrumen penelitian sehingga mampu dikatakan instrumen tersebut valid” (Sugiyono, 2020:176) Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Kriteria pengujian validasi yaitu, sebagai berikut:

1. Jika rhitung > rtabel maka butir maka butir pernyataan dianggap valid
2. Jika rhitung < rtabel maka butir maka butir pernyataan dianggap tidak valid
3. **Pengujian Reliabilitas Instrumen**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu konstruk (Sugiyono, 2020:177). Suatu kuesioner handal (reliabel) jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji reabilitas kuesioner digunakan teknik *cronbach alpha*, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan *cronbach alpha* > 0.70.

1. Metode Analisis Data
2. **Analisis Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2020:179) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Analisis statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran jawaban dan demografi responden penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja.

1. **Uji Asumsi Klasik**
2. **Uji Normalitas**

Sugiyono (2020:180-181) menjelaskan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat menggunakan dua cara yaitu:

* + - 1. Uji *kolmogorov smirnov,* di mana jika probabilitas < 0,05 maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Namun apabila probabilitas > 0,05 maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.
      2. Grafik normalitas *probability plot*, di mana data dianggap memenuhi asumsi normalitas bilamana titik-titik pada grafik berkumpul dan mendekati sepanjang garis diagonal.

1. **Uji Multikolinearitas**

Sugiyono (2020:181) mengungkapkan “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).” Lebih lanjut, Sugiyono, 2020:182) menjelaskan bahwa “model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.” Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut:

Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.

Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Sugiyono (2020:183) menjelaskan bahwa “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan maka itu menujukkan bahwa heteroskedastisitas telah terjadi, dan apabila tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

Intrepetasi yang digunakan selain melihat grafik *ScatterPlot* adalah uji park. Uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Masalah heterokedastisitas tidak akan terjadi apabila nilainya signifikansi antara variabel independen dengan absolut lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 pada tingkat kepercayaan 5%

1. **Uji Koefisien Determinasi**

“Uji koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapah jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen” (Sugiyono, 2020:185). Nilai R2 memiliki interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah, sebagai berikut:

1. Jika nilai *Adjusted* R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika *Adjusted* R2 bernilai kecil (menjauhi 1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas.
3. **Uji Hipotesis**
4. **Perumusan Persamaan regresi linear berganda**

Analisis regresi linier berganda *(Multiple Regression)* digunakan untuk menguji variabel satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2020:187). Secara sistematis adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

**Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e**

Keterangan:

Y = Solusi Permodalan UKM

α = Konstanta

X1 = *Financial Technology*

X2 = Intervensi Pemerintah

X3 = Struktur Aset

X4 = Pembiayaan Murabahah

β1-β4 = Koefisien regresi berganda

e = *Error Term*

1. **Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dalam penelitian ini sendiri menggunakan dua kriteria sebagai berikut:

* + - 1. Nilai koefisien variabel (β) menunjukkan arah penelitian, di mana jika nilainya positif maka pengaruh yang dihasilkan adalah pengaruh positif sedangkan jika nilainya negatif maka disimpulkan pengaruh yang dihasilkan adalah pengaruh negatif.
      2. Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) menunjukkan kekuatan pengaruh yang diberikan. Jika probabilitas menunjukkan nilai <0.05 maka dianggap terdapat pengaruh yang signifikan (kuat), sedangkan bila probabilitas menunjukkan nilai >0.05 maka dianggap terdapat pengaruh yang tidak signifikan (lemah)